



## LBH buka posko aduan TKI

Oleh Yusufa Anjar Palupi  
HARIAN JOGJA

**JOGJA:** Menyusul banyaknya aduan terkait maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh sejumlah oknum terhadap para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kesulitan pengurusan klaim asuransi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja membuka layanan posko aduan TKI korban PHK.

"Tidak hanya dipersulit pengurusan pencairan klaim asuransi YKI, mereka juga tidak diberi gaji hingga sisa akhir kontrak," terang Direktur LBH Jogja, Irsyad Thamrin kepada *Harian Jogja*, Selasa (24/2).

Irsyad menuturkan posko aduan yang dibuka oleh LBH ini nantinya akan melakukan sosialisasi terkait hak-hak TKI serta melakukan advokasi terhadap pemenuhan hak-hak TKI yang menjadi korban.

"Dalam level kebijakan LBH juga akan menuntut dan mendesak negara dalam hal ini pemerintah untuk proaktif melakukan perlindungan dan pelayanan kepada TKI yang menjadi korban PHK," jelas dia.

### Pelatihan

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Sosial Nakertrans) Kota Jogja akan mengikutsertakan para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam sejumlah kegiatan pelatihan tenaga kerja (naker).

Salah satunya mereka akan diikutkan dalam program padat karya produktif yang saat ini akan dilaksanakan. "Selama mereka tercatat sebagai warga kota, maka mereka bisa diikutkan dalam program padat karya produktif," ujar Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Sosial Nakertrans Kota Jogja, Sri Mulyatiningsih kepada *Harian Jogja*, Rabu (25/2).

Dengan mekanisme pendaftaran melalui kelurahan. Karena proses pendaftaran program padat karya dilakukan per kelurahan. Di samping dapat diikutkan dalam program padat karya, para TKI korban PHK bisa juga mengikuti sejumlah pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Nakertrans.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005